

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Responden

1. Umur

Jumlah responden secara keseluruhan berjumlah 36 orang ibu yang menerima dana Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu diantaranya adalah anggota kelompok SPP Kartini sebanyak 10 orang, Nurul Falah sebanyak 10 orang, Mandiri sebanyak 10 orang dan Kenanga sebanyak 6 orang. Sehingga diperoleh total responden sebanyak 36 orang.

Berdasarkan hasil penelitian dari 36 responden (anggota kelompok SPP) tersebut terdapat dua orang yang memiliki pendapatan diluar rata-rata (*out layer*) sehingga sebaran responden menurut pendapatan menjadi tidak merata. Kedua responden tersebut dikeluarkan dari daftar analisis agar penyebaran pendapatan menjadi merata.

Ditinjau dari segi umur, responden dalam penelitian ini memiliki umur antara 25 tahun sampai umur 45 tahun. Untuk melihat sebaran responden berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Sebaran responden simpan pinjam perempuan (SPP) berdasarkan umur.

Umur (tahun)	Klasifikasi	Jumlah (Orang)	Persentase
25 - 31	Muda	5	14,71
32 - 38	Separuh Baya	9	26,47
39 - 45	Tua	20	58,82
Jumlah		34	100,00
Rata-rata 38 tahun (Separuh Baya)			

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa anggota kelompok SPP memiliki umur rata-rata yaitu 38 tahun yang termasuk dalam klasifikasi separuh baya. Sebagian besar responden yang merupakan anggota kelompok SPP PNPM-MP berada dalam klasifikasi tua yaitu sebanyak 21 orang dengan persentase 58,33 persen dari total responden. Sedangkan untuk responden yang berada pada klasifikasi muda yaitu sebanyak 5 orang dengan persentase 13,89 persen.

Menurut Rusli (1983), usia produktif seseorang berkisar antara 15 – 64 tahun. Pada usia produktif tersebut umumnya tingkat kemauan, semangat dan kemampuan untuk berusaha cenderung lebih tinggi. Umur rata-rata responden dalam penelitian ini adalah 38 tahun, artinya usia responden termasuk produktif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan usia yang produktif, responden memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan usahanya dengan menggunakan modal pinjaman SPP di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten karena pada usia tersebut responden memiliki tingkat kemauan, semangat dan kemampuan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan seseorang yang berusia tua (sudah tidak produktif).

2. Jumlah Pinjaman Yang Diterima

Jumlah pinjaman yang diterima adalah banyaknya dana pinjaman SPP yang diterima oleh anggota kelompok SPP untuk menjalankan usahanya. Pada awal pembetukan kegiatan SPP PNPM-MP, jumlah pinjaman yang diterima oleh seorang anggota kelompok SPP harus sama dengan anggota yang lainnya. Namun sejak perguliran tahun 2011, telah ditetapkan bahwa besarnya pinjaman dana yang diterima oleh anggota SPP dapat disesuaikan dengan kebutuhan akan pinjaman tersebut. Anggota kelompok SPP yang memiliki kebutuhan akan modal usaha yang lebih besar diperbolehkan menerima dana pinjaman lebih banyak. Begitu juga sebaliknya, anggota SPP yang memiliki kebutuhan modal yang sedikit dapat menerima dana pinjaman lebih sedikit pula. Meskipun pembagian dana pinjaman tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, namun dana yang diterima oleh masing-masing kelompok adalah sama yaitu sebesar Rp 10.000.000,- dan pembagiannya di dalam kelompok didasarkan atas kesepakatan bersama para anggota kelompok tersebut.

Setiap anggota kelompok akan dikenakan potongan jaminan kematian pada saat pencairan. Potongan tersebut sebesar Rp. 50.000,- untuk jumlah pinjaman Rp. 1.000.000,- atau di bawahnya. Besarnya potongan tersebut akan disesuaikan dengan besar pinjaman dengan kelipatan Rp. 1.000.000,- dengan peningkatan besar potongan sebesar Rp. 50.000,-. Lebih jelasnya jumlah pinjaman yang diterima oleh setiap anggota dapat dilihat pada Tabel 17 (Lampiran).

Bagi setiap kelompok dapat mengajukan pinjaman yang kedua kalinya dengan anggota kelompok yang sama dan dengan jumlah pinjaman yang lebih besar dari pinjaman yang sebelumnya dengan maksimal peminjaman sebesar Rp. 20.000.000,-. Namun untuk dapat mengajukan pinjaman yang kedua, kelompok SPP harus memenuhi beberapa syarat di antaranya adalah tidak pernah menunggak dalam setiap pengangsuran pinjaman, para anggota selalu aktif mengikuti setiap kegiatan yang melibatkan kelompok SPP (rapat bulanan atau musyawarah yang berkaitan dengan pinjaman dana SPP, dan rapat pembagian ranking desa yang akan menerima alokasi dana karena dalam hal ini kelompok perempuan turut dilibatkan) dan juga kelompok tersebut tidak masuk dalam kategori kelompok yang bermasalah.

Dana SPP PNPM-MP diberikan kepada kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memberikan pinjaman modal. Selanjutnya modal tersebut digunakan oleh para anggota kelompok SPP untuk menjalankan usahanya. Jenis usaha yang dijalankan oleh para anggota kelompok SPP terbagi atas usaha dibidang pertanian dan usaha dibidang nonpertanian. Keadaan usaha dibidang pertanian dijalankan oleh anggota kelompok perempuan dengan memproduksi hasil pertanian seperti menanam padi dan mentimun. Sedangkan untuk kegiatan usaha dibidang nonpertanian diantaranya dengan berdagang, membuat anyaman bambu, menjahit, memproduksi makanan dan lainnya.

Berdasarkan pengamatan lapang diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jenis usaha yang diajukan di dalam proposal dengan kenyataan usaha yang dijalankan oleh anggota kelompok SPP. Berdasarkan hal tersebut seharusnya untuk periode selanjutnya kelompok SPP tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan pinjaman kembali walaupun pembayaran angsuran dari kelompok tersebut terhitung lancar atau tidak pernah menunggak.

Sebelum dilakukan pencairan dana, salah satu tahap verifikasi proposal adalah pelaksanaan survei terhadap kelompok yang mengajukan pinjaman dana SPP oleh kader UPK . Ketidaksesuaian antara keadaan lapangan dengan proposal yang diajukan menjadi salah satu pertimbangan layak atau tidaknya kelompok SPP menerima pinjaman dana SPP PNPM-MP. Jika terjadi ketidaksesuaian antara proposal yang diajukan dengan keadaan lapang maka kelompok tersebut tidak masuk dalam layak menerima pinjaman. Namun pada kenyataannya terdapat kelompok yang tetap mendapatkan pinjaman, walaupun jenis usaha yang diajukan tidak sesuai dengan kenyataan usaha yang dijalankan oleh anggota kelompok tersebut. Pengawasan yang kurang oleh pemerintah terhadap kinerja para pengurus PNPM-MP di tingkat kecamatan mengakibatkan terjadi kesewenang-wenangan para pengurus dalam hal pengambilan keputusan termasuk dalam pemberian bantuan dana pinjaman SPP PNPM-MP.

Berdasarkan pengamatan lapang juga diketahui bahwa terdapat beberapa anggota kelompok SPP yang menjalankan usaha lebih dari satu usaha.

Selain itu juga terdapat anggota kelompok SPP yang menjalankan usahanya dengan jumlah modal lebih besar dari pinjaman yang diterima oleh anggota kelompok tersebut. Pinjaman yang diterima oleh anggota kelompok tersebut hanya digunakan untuk menambah kekurangan modal usaha yang dijalankan atau dengan kata lain anggota kelompok tersebut sudah memiliki usaha yang dijalankan dengan menggunakan dana pribadi dan dana pinjaman yang diterima adalah untuk menambah modal pribadi dalam mengembangkan usahanya.

B. Deskripsi Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Pengembalian Pinjaman Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

1. Tingkat Pendapatan Usaha

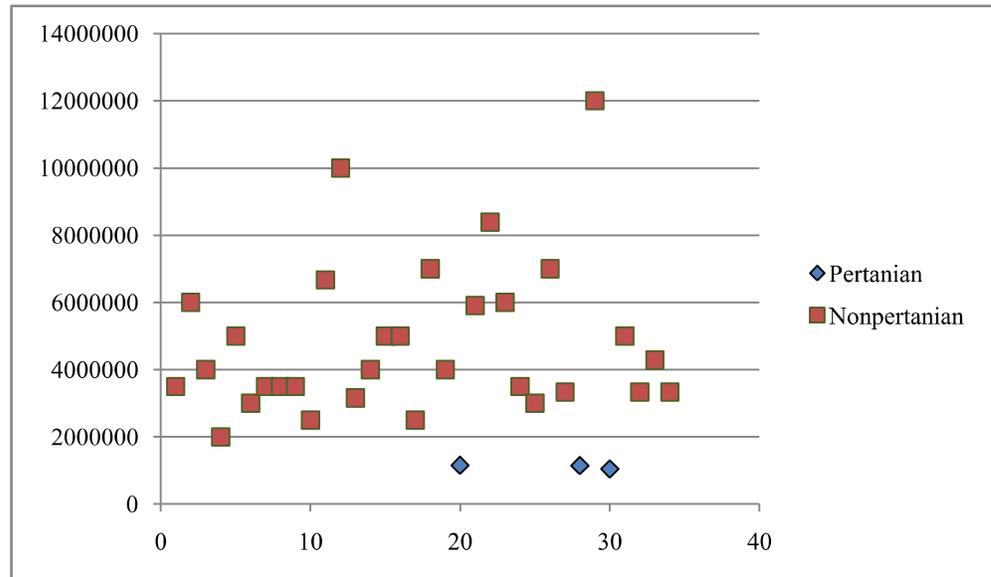
Pendapatan usaha adalah tingkat pendapatan dari hasil usaha dalam kurun waktu satu periode peminjaman (10 bulan) dan diukur dalam satuan rupiah. Dalam penelitian ini pendapatan usaha yang digunakan adalah pendapatan usaha yang telah dikurangi dengan biaya usaha atau pendapatan bersih. Pendapatan bersih biasanya juga disebut sebagai keuntungan usaha. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendapatan usaha dengan menggunakan dana pinjaman SPP dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Sebaran responden berdasarkan pendapatan hasil usaha dengan menggunakan dana pinjaman SPP.

Pendapatan (Rp)	Klasifikasi	Jumlah (Orang)	Persentase
1.042.635 - 4.695.090	Rendah	21	61,76
4.695.091 - 8.347.546	Sedang	10	29,42
8.347.547 - 12.000.000	Tinggi	3	8,82
Jumlah		34	100,00
Rata-rata Rp. 4.477.742,- (Rendah)			

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa sebaran responden berdasarkan pendapatan hasil usaha dengan menggunakan dana pinjaman SPP termasuk dalam kategori rendah dengan rata-rata Rp. 4.477.742,-. Sebanyak 21 responden memiliki tingkat pendapatan rendah yaitu antara Rp. 1.042.635,- sampai Rp. 4.695.090,-. Sedangkan responden yang memiliki tingkat pendapatan tinggi yaitu sebanyak 3 responden dengan tingkat pendapatan antara Rp. 8.347.547,- sampai Rp. 12.000.000,-.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa sebagian besar pendapatan nonpertanian lebih tinggi dari usaha pertanian. Keadaan ini dapat dilihat ada Gambar 2 tentang sebaran pendapatan usaha.



Gambar 2. Sebaran pendapatan usaha berdasarkan jenis usaha

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa sebagian besar pendapatan usaha dibidang non pertanian lebih besar dibandingkan dengan pendapatan usaha dibidang pertanian. Pendapatan tertinggi terdapat pada usaha dibidang nonpertanian yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- dengan usaha yang dijalankan adalah usaha penjualan baju.

Pendapatan yang diterima oleh anggota kelompok SPP yang menjalankan usahanya dibidang pertanian memiliki pendapatan yang jauh lebih sedikit karena biaya produksi yang sangat tinggi dan harga jual yang sangat rendah pada saat panen. Responden yang menjalankan usahanya dibidang pertanian juga memiliki kendala lain yaitu karena para responden baru menerima uang setelah panen sehingga terjadi keterlambatan dalam melakukan pengangsuran. Semakin lama masa

produksi tanaman yang ditanam, maka akan semakin lama pula para responden menerima penghasilan dari usaha pertanian tersebut. Untuk menutup angsuran setiap bulannya para responden meminjam uang kepada tengkulak.

Sebagian besar anggota kelompok SPP yang menjalankan usahanya dibidang nonpertanian menjalankan usahanya dibidang jual beli atau perdagangan dan anyaman bambu. Berbagai kendala yang dihadapi anggota kelompok SPP dalam menjalankan usaha perdagangan di antaranya pendapatan yang diperoleh tidak menentu dan meningkatnya harga asal barang dagangan yang meningkat sehingga berakibat pada keuntungan yang mereka peroleh menjadi menurun. Jika mereka menaikkan harga jual akan berakibat pada berkurangnya daya beli pelanggan. Selain itu banyaknya pembeli yang berhutang membuat penerimaan mereka tertunda, sedangkan pembayaran angsuran SPP tidak dapat ditunda waktu pembayarannya. Kendala yang dihadapi oleh anggota kelompok SPP yang menjalankan usaha anyaman bambu diantaranya karena bambu sebagai bahan baku yang sering telat datang sehingga menjadi tertunda juga.

2. Tingkat Pengetahuan Anggota Kelompok Perempuan Tentang Pinjaman Dana SPP

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu (Notoatmodjo, 2007). Tingkat pengetahuan anggota kelompok perempuan (responden) tentang pinjaman dana SPP adalah sejauh mana responden mengetahui tentang

ketentuan-ketentuan dalam kegiatan SPP baik tata cara, syarat maupun tujuan dari kegiatan SPP ini. Tingkat pengetahuan akan mempengaruhi responden dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan usahanya maupun kegiatan yang lainnya yang berhubungan dengan SPP.

Untuk melihat sebaran responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang pinjaman dana SPP dapat di lihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Sebaran responden berdasarkan tingkat pengetahuan anggota kelompok perempuan tentang pinjaman dana SPP.

Skor	Klasifikasi	Jumlah (Orang)	Persentase
68,00 – 78,00	<i>Rendah</i>	7	20,59
78,01 – 88,01	Sedang	10	29,41
88,02 – 98,00	Tinggi	17	50,00
Jumlah		34	100,00
Rata-rata 85 (Sedang)			

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa sebaran responden berdasarkan tingkat pengetahuan anggota kelompok perempuan tentang pinjaman dana SPP berada pada kategori sedang dengan rata-rata 85. Sebanyak 7 responden memiliki tingkat pengetahuan dengan klasifikasi rendah yaitu dengan skor antara 68,00 sampai 78,00. Sebanyak 17 responden memiliki tingkat pengetahuan dengan klasifikasi tinggi dengan skor antara 88,02 sampai 98,00.

Pengetahuan-pengetahuan responden tentang SPP dapat diperoleh melalui penyuluhan oleh kader PNPM-MP ditingkat desa, fasilitator kecamatan

ataupun dari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PNPM-MP.

Tingkat pengetahuan responden yang tinggi akan berhubungan dengan pemahaman responden dalam menerima informasi tentang SPP sehingga diharapkan mereka mampu melaksanakan segala peraturan yang ada tentang SPP PNPM-MP.

C. Kelancaran Pengembalian Pinjaman Dana SPP PNPM-MP

1. Tepat Waktu Pengembalian (Y₁)

Tingkat ketepatan waktu pengembalian pinjaman dana adalah tingkat kesesuaian waktu (hari) pengembalian kredit yang dilakukan oleh anggota kelompok dengan waktu pengembalian yang telah ditentukan dalam MAD. Untuk melihat sebaran responden berdasarkan ketepatan waktu pengembalian dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Sebaran responden berdasarkan ketepatan waktu pengembalian.

Hari	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase
205– 237	Kurang Tepat	3	8,82
238– 270	Cukup Tepat	0	0,00
271– 300	Tepat	31	91,18
Jumlah		34	100,00
Rata-rata 291 (Tepat)			

Tabel 12 menerangkan bahwa sebaran responden berdasarkan ketepatan waktu pengembalian yang berada pada kategori “tepat” dengan rata-rata 290 hari. Sebanyak 3 responden termasuk dalam kategori kurang tepat

dengan persentase 8,33 persen. Sebanyak 32 responden termasuk dalam kategori tepat dengan persentase 88,89. Meskipun dalam klasifikasi tingkat pengembalian masuk dalam kategori tepat, namun berdasarkan keadaan di lapangan masih banyak para anggota kelompok SPP yang mengembalikan pinjaman secara tidak tepat waktu. Untuk para anggota kelompok SPP yang menjalankan usahanya dibidang pertanian, mereka mengandalkan dana talangan dari para tengkulak untuk melakukan pengangsuran pinjaman dengan jaminan mereka akan menjual hasil panen mereka kepada tengkulak tersebut dan dipotong dengan pinjaman sebelumnya. Sedangkan untuk anggota yang menjalankan usahanya dibidang nonpertanian, mereka menggunakan dana sumbangan wajib bagi kelompok yang masih belum terpakai untuk menjalankan usaha bersama untuk menalangi angsuran pinjaman mereka dan mereka akan menggantinya dihari lain sehingga kelompok yang anggotanya mengalami keterlambatan tetap tidak terkena denda keterlambatan.

2. Tepat Jumlah Dana Pinjaman (Y₂)

Ketepatan jumlah dana pinjaman merupakan kesesuaian antara angsuran pinjaman yang harus dibayarkan oleh responden dengan keadaan nyata responden dalam melakukan pengangsuran pinjaman dana setiap bulannya. Untuk melihat sebaran responden berdasarkan ketepatan jumlah dana pinjaman dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Sebaran responden berdasarkan ketepatan pengembalian jumlah dana pinjaman.

Persentase	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase responden
70,00 - 80,00	Kurang Tepat	3	8,82
80,01 - 90,01	Cukup Tepat	7	20,59
90,02 - 100,00	Tepat	24	70,59
Jumlah		34	100,00
Rata-rata 95 (Tepat)			

Tabel 13 menerangkan bahwa sebaran responden berdasarkan ketepatan jumlah dana pinjaman. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata sebaran responden berdasarkan ketepatan pengembalian jumlah dana pinjaman adalah 95 yang masuk dalam kategori “tepat”. Sebanyak 3 responden masuk dalam kategori kurang tepat dengan persentase pengembalian antara 70,00 sampai 80,00. Sebanyak 24 responden masuk dalam kategori tepat dengan persentase pengembalian antara 90,02 sampai 100,00.

Berdasarkan tingkat ketepatan pengembalian jumlah pinjaman rata-rata pengembalian jumlah dana pinjaman SPP PNPM-MP di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu masuk dalam kategori tepat. Namun berdasarkan keadaan lapang diketahui bahwa masih banyak anggota kelompok SPP yang membayarkan angsuran pinjamannya secara tidak tepat jumlah. Keadaan ini terjadi karena masih terdapat anggota kelompok yang tidak menggunakan dananya sendiri untuk melakukan pengangsuran. Mereka menggunakan dana talangan untuk menutupi angsuran pinjaman yang seharusnya mereka bayar dengan dana hasil usaha mereka sendiri.

3. Rekapitulasi Pengembalian Dana Pinjaman SPP PNPM-MP

Rekapitulasi pengembalian dana pinjaman SPP PNPM-MP ini merupakan penggabungan ranking antara variabel Y1 dan variabel Y2, sehingga diperoleh variabel Y total. Dari data Y total tersebut dapat diketahui sejauh mana tingkat kelancaran responden dalam melakukan pengembalian atau pengangsuran pinjaman selama satu periode peminjaman (10 bulan). Untuk melihat sebaran responden berdasarkan tingkat kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Sebaran responden berdasarkan tingkat kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP.

Ranking	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase
25,00 – 38,67	Kurang Lancar	24	70,59
38,68 - 52,35	Cukup Lancar	0	0,00
52,36 - 66,00	Lancar	10	29,41
Jumlah		34	100,00
Rata-rata 35,00 (Kurang Lancar)			

Tabel 14 merupakan tabel sebaran responden berdasarkan tingkat kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata rata sebaran responden berdasarkan tingkat kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP adalah 35,00 yang masuk dalam kategori kurang lancar. Sebanyak 24

responden termasuk dalam kategori kurang lancar dengan persentase 70,59 persen. dan sebanyak 10 orang termasuk dalam kategori lancar dengan persentase 29,41 persen.

D. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Pengembalian Pinjaman Dana SPP PNPM-MP.

Hubungan antara variabel dianalisis menggunakan Uji Korelasi *Rank Spearman* dengan menggunakan SPSS 16. Korelasi *Rank Spearman* digunakan untuk mencari hubungan atau menguji hipotesis asosiatif dan masing-masing variabel yang digunakan berbentuk ordinal dengan sumber data antar variabel tidak harus sama. Karena korelasi *Rank Spearman* bekerja dengan data ordinal maka data penelitian yang berbentuk rasio harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk ordinal yaitu dengan merangking variabel rasio tersebut sebelum dianalisis (Sugiyono, 2004).

Setelah dilakukan perangkingan data selanjutnya dilakukan penganalisisan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Hasil pengujian variabel X dengan variabel Y dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Hasil pengujian variabel X dengan variabel Y

Variabel x	Variabel Y	R _s	t _{hitung}	t _{tabel}	Nilai Signifikan
X1 : Tingkat pendapatan usaha	Kelancaran pengembalian dana	0,453	2,874**	2,450	0,004**
X2 : Tingkat pengetahuan anggota kelompok tentang pinjaman dana SPP	pinjaman dana SPP PNPM-MP	-0,349	-2,106*	1,694	0,022*

Keterangan :

R_s = Rank Spearman

* = Berhubungan nyata pada taraf kepercayaan 95% (α 0,05)
(t-tabel = 1,694)

** = Berhubungan sangat nyata pada taraf kepercayaan 99% (α 0,01)
(t-tabel = 2,450)

Berdasarkan hasil uji hubungan yang disajikan pada Tabel 15 dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan usaha pada taraf kepercayaan 99% (α 0,01) memiliki hubungan yang sangat nyata. Tingkat pengetahuan anggota kelompok tentang pinjaman dana SPP memiliki hubungan yang nyata pada taraf kepercayaan 95% (α 0,05).

Tingkat pendapatan usaha diduga berhubungan nyata dengan kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP. Semakin tinggi tingkat pendapatan usaha diharapkan semakin tinggi pula tingkat pengembalian pinjaman dana SPP PNPM –MP. Hasil pengujian hipotesis hubungan antara tingkat pendapatan usaha dengan kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP dengan menggunakan uji Korelasi Rank Spearman diketahui bahwa tingkat pendapatan usaha memiliki hubungan

yang searah dengan tingkat kesalahan ($\alpha 0,01$) atau sangat nyata. Yang dimaksud dengan hubungan searah adalah peningkatan yang terjadi pada pendapatan usaha akan berakibat pada semakin lancar pula tingkat pengembalian pinjaman SPP PNPM-MP.

Tingkat pengetahuan anggota kelompok tentang pinjaman dana SPP diduga berhubungan nyata dengan kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP. hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan anggota kelompok tentang pinjaman dana SPP berhubungan nyata dengan kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP pada taraf kesalahan ($\alpha 0,05$). Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang saling berlawanan arah yaitu semakin tinggi tingkat pengetahuan anggota kelompok tentang pinjaman SPP maka tingkat pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP akan semakin tidak lancar.

E. Pembahasan

a. Hubungan antara tingkat pendapatan usaha dengan kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP

Menurut penelitian Rawati (2006) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kelancaran pengembalian kredit pada program pengembangan ketahanan pangan (PKP) di desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, tingkat pendapatan dan tingkat pengetahuan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengembalian pinjaman. Namun, hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu mengenai SPP PNPM-

MP, tingkat pendapatan usaha memiliki hubungan yang sangat nyata pada $\alpha 0,01$.

Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan usaha yang dijalankan oleh anggota kelompok SPP berhubungan dengan kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP. Semakin tinggi tingkat pendapatan usaha yang dimiliki, maka semakin tinggi pula tingkat kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan usaha yang dimiliki oleh anggota kelompok SPP, maka semakin rendah tingkat kelancaran pengembalian pinjaman SPP PNPM-MP. Tingkat pendapatan usaha menjadi salah satu faktor berhasilnya pelaksanaan SPP PNPM-MP di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu karena mereka telah mampu meningkatkan pendapatan melalui usaha yang telah dijalankan dengan menggunakan pinjaman dana SPP sehingga tujuan utama kegiatan SPP yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dapat tercapai.

b. Hubungan antara tingkat pengetahuan anggota kelompok tentang pinjaman dana SPP dengan kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP

Tingkat pengetahuan tentang anggota kelompok tentang pinjaman dana SPP memiliki hubungan nyata dengan kelancaran pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP. Semakin tinggi tingkat pengetahuan anggota kelompok tentang kegiatan SPP maka diharapkan akan semakin lancar pula tingkat pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang nyata

antara tingkat pengetahuan anggota kelompok tentang pinjaman dana SPP dengan tingkat pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Namun, hubungan yang terjadi antara keduanya adalah hubungan yang saling berlawanan arah yang artinya semakin tinggi tingkat penerahuan anggota kelompok tentang SPP maka tingkat pengembaliannya justru akan semakin tidak lancar.

Hubungan yang berlawanan arah ditunjukkan dengan adanya tanda negatif pada t_{hitung} . Keadaan ini tidak sesuai dengan anggapan yang sebelumnya yaitu semakin tinggi tingkat pengetahuan anggota kelompok tentang SPP maka akan semakin tinggi pula tingkat pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP.

Ketidaksesuaian tersebut karena adanya faktor lain yang menyebabkan kurang lancarnya pengembalian pinjaman dana SPP PNPM-MP. Faktor lain yang mengakibatkan para anggota kelompok SPP melakukan keterlambatan dalam melakukan pengangsuran pinjaman adalah faktor musibah yang dialami oleh anggota kelompok SPP meskipun hanya sebagian kecil saja anggota yang terkena musibah. Faktor pemenuhan kebutuhan yang sangat mendesak juga berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pinjaman dana SPP. Meskipun para anggota kelompok SPP memiliki tingkat pengetahuan tentang SPP yang tinggi, namun hal tersebut tidak menjadi ukuran bahwa tingkat pengembalian pinjaman mereka akan lancar. Mereka akan lebih mengutamakan untuk

memenuhi kebutuhan mereka seperti untuk membeli bahan pokok, biaya masuk sekolah anak, pembayaran angsuran bulanan lainnya (kendaraan dan lain-lain), sehingga pembayaran angsuran SPP PNPM-MP menjadi tertunda atau menunggak.

Penunggakan pembayaran angsuran pinjaman dana SPP PNPM-MP menjadi alternatif jalan keluar dalam mengatur keuangan. Setiap anggota kelompok SPP PNPM-MP pada setiap bulannya selain harus membayar angsuran pinjaman, anggota kelompok SPPP juga harus membayar iuran wajib bagi kelompok sebesar Rp 20.000,- setiap bulannya. Iuran wajib ini ditujukan untuk kelompok tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan usaha bersama ataupun juga dapat digunakan untuk menalangi anggota kelompok yang terlambat dalam pengangsuran pinjaman sehingga kelompok tersebut tidak dikenakan denda keterlambatan pengangsuran. Sedangkan untuk anggota yang melakukan keterlambatan dalam pengangsuran pinjaman diwajibkan mengganti uang iuran wajib tersebut yang telah digunakan untuk menalangi angsuran tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut dapat diketahui bahwa mereka bergantung pada dana iuran wajib bagi kelompok tersebut untuk menalangi angsuran SPP mereka sehingga mereka tidak dikenakan denda oleh pihak UPK meskipun telah melakukan keterlambatan dalam melakukan pengangsuran dan mereka cukup mengganti dana talangan tersebut ditambah iuran wajib per bulannya kepada kelompok tersebut.